

## **DISKURSUS IDENTITAS DAN PILGUB NTT DALAM LOGIC OF CRITICAL EXPLANATION**

**Yeheskial A. Roen**

*Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana,  
[yeheskialroen@staf.undana.ac.id](mailto:yeheskialroen@staf.undana.ac.id)*

### **ABSTRAK**

*Artikel ini berfokus menguraikan diskursus identitas primordial dalam Pilgub NTT. Secara spesifik, studi ini menganalisa dinamika identitas etno-religius pada Pilgub NTT dengan menggunakan kerangka logics of critical explanation. Logic of critical explanation merupakan upaya metodologis yang dilakukan oleh Glynos dan Howarth (2007) dalam mengoperasionalisasi teori diskursus Laclau-Mouffe yang selama ini dianggap terlalu abstrak dan defisit metodologi. Mengikuti kerangka metodologi tersebut dan mengumpulkan data teks yang berkaitan dengan isu identitas dan pilgub NTT pada koran Pos Kupang, Timor Ekspres dan Victory News, maka kemudian hasil penelitian menemukan terdapat tiga nalar yang menjelaskan fenomena identitas dalam politik NTT, yakni logika sosial, logika politik dan logika fantasmatic. Logika sosial membantu mengidentifikasi penanda-penanda apa saja yang disematkan pada diskursus identitas dalam pilgub NTT, sementara nalar politik menjelaskan perihal konstruksi dan kemunculan identitas etno-religius dalam Pilgub NTT. Dan yang terakhir, bagaimana diskursus identitas mencengkram subyek pemilih dalam sub-nalar beatific dan horrific merupakan penjelasan logika fantasmatic. Melalui uraian ini, studi ini memberikan penjelasan alternatif dan kritis dalam memaknai diskursus identitas etno-religius dalam politik elektoral, sekaligus menjadi upaya lanjutan dalam mengoperasionalisasi teori diskursus Laclau-Mouffe pada penelitian empirik.*

**Kata Kunci:** Etno-religius: Identitas: Logics approach: NTT: Pilgub

### **1. PENDAHULUAN**

Studi mengenai politik elektoral pasca reformasi tidak dapat dilepas pisahkan dengan diskursus identitas agama dan etnis. Frase “pribumi-non pribumi”, “Putra daerah”, “Indonesia asli”, “orang apa dan orang mana” dll menjadi kosakata yang selalu muncul pada perhelatan kontestasi politik (Nordholt, 2007). Berbicara mengenai politik hampir tidak dapat dilepaskan dengan isu agama dan etnis. Agama dan etnis menjadi ‘nodal point’ titik simpul dalam politik elektoral.

Tidak terkecuali dengan situasi politik Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT sebagai provinsi multi agama dan etnis telah menyelenggarakan pesta demokrasi langsung untuk ketiga kalinya, pemilihan Kepala Daerah Langsung NTT pertama kali dilangsungkan pada tahun 2008, dilanjutkan pada 2013 dan 2018. Patut dicatat bahwa proses rekrutmen pejabat pada tiga pilgub tersebut berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya rekrutmen pejabat politik representasi oleh peran sentral parlemen daerah (DPRD), maka sejak 2008 peran sentral elit parlemen daerah tidak lagi dominan. Pemilihan Gubernur NTT dipilih secara langsung oleh rakyat sendiri. Ibarat pertandingan sepak bola, kini rakyat tidak lagi ditempatkan sebagai suporter pada bangku penonton, tetapi rakyat ditempatkan sebagai pemain dalam pertandingan tersebut. Dengan kata lain, sejak Pilgub 2008, rakyat yang empunya kedaulatan tidak lagi sekedar menjadi penonton (*suporter*), tetapi ditempatkan sebagai pemain (*voter*) yang ikut menentukan secara langsung figur pemimpin masa depan dalam setiap kontestasi politik NTT.

Namun demikian, perubahan arena politik seperti terungkap di atas, tidak mengubah praktek politik yang masih membasiskan pada isu-isu primordial (Bau, 1999; Sayrani, 2017; Bataona, 2017, Negong, 2017). Bahkan secara gamblang juga direfleksikan oleh Litbang Kompas satu tahun setelah Pilgub pertama (2009) dan beberapa bulan sebelum Pilgub (Setiawan, 2018) yang menjelaskan bahwa kontestasi politik NTT masih berbasis kelompok sosial, politik NTT masuk menunjukkan kecenderungan kuat berbasis pada identitas primordial— *etno-religius*.

Apa, mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengelaborasi kerangka metodologi] *Logics of Critical Explanation* (Glynos dan Howarth, 2007) dalam menganalisa diskursus identitas etno-religius berdasarkan nalar *critical explanation*. Kerangka kerja ini dihadirkan sebagai upaya menjawab kritik terhadap teori diskursus yang selama ini dianggap terlalu abstrak dan defisit metodologi. Tetapi tidak kalah penting juga, dengan menggunakan kerangka analisa ini maka peneliti dapat mengungkapkan dimensi politikal dan fantasi yang terkonstruksi pada diskursus identitas dalam pilgub NTT, sekaligus mengatur cara memahami identitas dalam politik elektoral dari cara berpikir dominan *political behavior* menuju cara pandangan *political discourse* Kerangka analisa tersebut dibagi menjadi tiga sub bagian, yakni *social logics*, *political logics*, dan *fantasmatic logics*. (Glynos & Howarth, 2007:145-151). Secara sederhana digambar sbb:

**Tabel 1. Kerangka Analisa**

Logics Approach	Social logic	Political logic	Fantasmatic logic
Sub-Logics	-	Ekuivalen dan diffences	Beatifik dan Horrofik
Karakteristik	Sinkronik	Diakronik	
Empirical question	<i>Apa</i>	<i>Bagaimana</i>	<i>Mengapa</i>
	Penanda apa saja yang disematkan pada diskursus identitas dalam Pilgub NTT	Bagaimana penanda2 tersebut muncul dan berkontestasi ?	Mengapa penanda 2 ( <i>social logic</i> ) dapat bertahan/dipertahankan ? berkaitan dengan strategi diskursif yang dijalankan

**Sumber:** Diadaptasi dari Glynos & Howarth, 2007

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan piranti analisis diskursus yang dikembangkan oleh Laclau-Mouffe (1985; Glynos & Howarth 2007, Remling 2017). Lokus penelitian adalah Pilgub NTT 2018. Sumber data berasal dari sejumlah korpus yang terdapat pada tiga koran, yakni Pos Kupang, Timor Ekspres dan Victory News terkait pemberitaan, opini, iklan yang termediasi pada koran-koran tersebut pada enam bulan menjelang Pilgub 2018. Selain data tersebut, peneliti juga mengumpulkan data wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh adat, politisi, penyelenggara Pilkada, dan warga pemilih. Seluruh data tersebut coding dan dianalisa dengan menggunakan alat bantu aplikasi Atlas.ti.

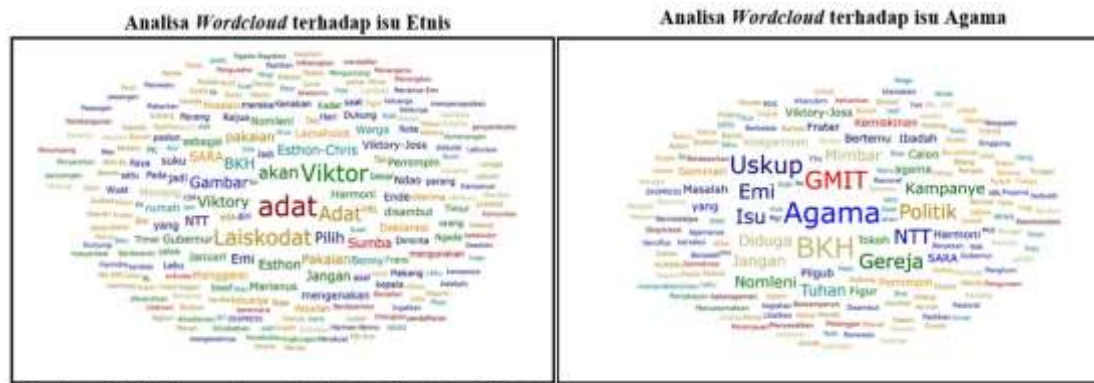
## 3. ANALISA DATA

Temuan pada diskursus identitas pada Pilgub NTT akan dianalisa dengan menggunakan lensa logika sosial, logika politik dan logika fantasmatic

Lensa analisa pertama, logika sosial, membantu mengidentifikasi penanda-penanda (*signifiers*) dominan yang disematkan pada diskursus identitas dalam Pilgub NTT (Gambar 1). Logika sosial membantu memberikan ‘*snapshot*’ wacana identitas dalam Pilgub NTT. Hasil analisa menemukan terdapat sejumlah penanda yang tersematkan. Terdapat penanda Uskup,

GMIT, gereja, dipanggil arwah leluhur, seperti nabi Yeremia, parang, deklarasi adat, penobatan menjadi tokoh/raja suku tertentu, tarian, rumah adat, dll merupakan sejumlah penanda yang menyertai diskursus identitas pada Pilgub NTT. Penanda-penanda tersebut tidak hanya mencerminkan realitas sosio-politik, tetapi juga memengaruhi/membentuk cara warga memahami dan merespon dunia sosio-politik Pilgub NTT.

**Gambar 1.** Penanda Dominan Pada Diskursus Identitas Dalam Pilgub NTT



Sumber: diolah oleh penulis melalui Analisa Wordcloud Atlas.ti

Kedua, logika politik, menjelaskan perihal bagaimana diskursif identitas terkonstruksi menjadi dominan dalam Pilgub NTT. Terdapat tiga artikulasi yang mengkonstruksi praktek identitas dalam politik elektoral. (1). Artikulasi warisan sejarah kolonial antara Belanda dan Portugis yang merepresentasi identitas keagamaan Protestan dan Katolik mempengaruhi relasi seteru-sekutu pada politik kontemporer hingga saat ini. (2). Artikulasi praktek representasi identitas dalam setiap pasangan calon, dimana pada setiap pasangan calon selalu terdapat representasi identitas Katolik/Flores dan Protestan/Timor. (3) juga ditopang dengan praktek politik keseharian yang terus menggunakan sentiment simbolik agama dan adat. Seperti mengunjungi tokoh agama, menggunakan simbol simbol adat seperti parang, didaulat menjadi tokoh/anak/saudara suku tertentu, dll. Praktek artikulasi demikian yang melahirkan kesadaran bahwa identitas seakan-akan menjadi realitas yang terberikan secara alamiah dan sekaligus mengkonstruksi eksistensi identitas dalam pilgub NTT.

Ketiga, logika fantasmatic; nalar ini menyediakan sarana untuk memahami mengapa dan bagaimana diskursus identitas etno-religius *mendripen* dan mencengkeram subyek-subyek yang terdapat didalamnya dengan menciptakan “ilusi kebutuhan” sebagai upaya naturalisasi kontingensi radikal yang terdapat didalamnya. Logika fantastik dipandu oleh dua sublogika, yakni *beatific dimension* dan *horrific dimension*. Dimensi beatifik berkaitan dengan janji utopis tentang masa depan yang indah jika narasi yang diusulkan diikuti, sementara dimensi horrific berkaitan dengan hal-hal distopia, yang digambarkan dapat mendatangkan sesuatu yang menakutkan/mengerikan jika jalan yang diusulkan tidak diikuti atau ditinggalkan (Glynos dan Horwath, 2007; Remling, 2017). Salah satu temuan beroperasinya logika fantastik dapat dilihat pada Representasi identitas dalam setiap pasangan calon untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat plural merupakan janji utopis yang harus laksanakan, bila tidak maka mengancam dan berpotensi terjadi konflik serta menjadi trauma historik tersendiri dalam masyarakat NTT itu sendiri (dimensi horifik).

#### 4. KESIMPULAN

Apa yang telah diuraikan di atas merupakan bagian dari upaya deskripsi singkat apa, bagaimana dan mengapa identitas etno-religius dalam Pilgub NTT terkonstruksi seperti demikian dengan menggunakan pendekatan *critical explanation*. Beberapa catatan yang dapat

diberikan diantaranya adalah bahwa (1). Studi ini ingin menunjukkan bahwa teori diskursus Laclau yang dianggap abstrak dan defisit metodologi ternyata bisa juga di *exercise* dalam penelitian empirik. (2). Studi ini juga ingin menggeser cara berpikir studi identitas yg selama ini banyak didekati dengan pendekatan *political behavior* ke *political discourse*. (3). Studi ini menunjukkan bahwa identitas dalam politik elektoral bukanlah sesuatu yg turun yg langit dan alamiah (*taken for granted*), tetapi dibentuk dalam konstruksi yg diskursif, konstruksi identitas dalam politik elektoral NTT dipengaruhi oleh berbagai artikulasi yang saling memengaruhi sehingga melahirkan narasi identitas etno-religius dalam politik elektoral.

## REFERENSI

- Bataona, Mikhael Rajamuda dan Atwar Bajari (2017) “Relasi Kuasa Dan Simbol Ekonomi-Politik Gereja Dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi NTT” *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 121-135, Doi: 10.24198/jkk.v5i2.8831
- Bau, Yanuarius Koli., (1999), “*Negara, Etnisitas dan Sektor Informal: Kasus Kupang, Nusa Tenggara Timur*” (Disertasi), Yogyakarta: Ilmu Sosiologi-UGM.
- Glynos, Jason & Howarth, (2007) “Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory” New York, Routledge
- Kompas, (2018) “*Kontestasi Berbasis Identitas Sosial*”. 07 Maret, Hal.7
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, (1985) “*Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*” London & New York: Verso
- Negong, Y. (2017). “*Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013*” *Politika: Jurnal Ilmu Politik*
- Remling, Elise. 2017. *Logics, Assumptions and Genre Chains: a Framework for Poststructuralist Policy Analysis*. (Critical Discourse Studies, Vol 15 No. 1).
- Setiawan, Bambang., (2009) “*Dikotomi dan Aristokrasi dalam Kontestasi*” Kompas, 5 Maret.
- Sayrani, Laurens., (2017), “*Dinamika Representasi Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*” (Disertasi), Yogyakarta; Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik UGM.